

TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
TANAH BERSERTIPIKAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
PEMBUATAN AKTA PPAT (STUDI PADA PPAT DI KABUPATEN
DHARMASRAYA)

(Putri Wulandari, NIM:1420122013, Fakultas Hukum Program Magister
Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2016)

ABSTRAK

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik-konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan system administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebagai akta otentik akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tesis ini penulis beri judul Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta PPAT (Studi Pada PPAT di Kabupaten Dharmasraya). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembuatan akta, faktor-faktor penyebab dan sanksi yang ditimbulkan kepada PPAT atas pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan akta PPAT. Dipakai metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada, kemudian setelah data selesai dianalisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta PPAT adalah: PPAT diberhentikan dengan tidak hormat, Akta PPAT terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan pihak ketiga dapat memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya.

PPAT RESPONSIBILITY IN MAKING LAND SALE BERSERTIPIKAT DEED
NOT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF MAKING PPAT
DEED (PPAT IN STUDY ON DHARMASRAYA)

(Putri Wulandari, NIM: 1420122013, Faculty of Law Master of Notary Program
Andalas University in Padang, 2016)

ABSTRACT

The more the importance of soil for human life today led to an increase the potential for the emergence of conflicts or land disputes, to prevent or at least reduce the potential for conflict or the dispute required legal instruments and land administration system that is organized and neat. Therefore required transfer of the land to be registered must be proven by deed PPAT. As an authentic act PPAT deed must meet ordinances PPAT deed as determined by law and other regulations. A deed which is not in accordance with the procedures PPAT deed may pose a risk to security of rights to land arising from or recorded on the basis of the deed. Based on this background, the author of this thesis titled Responsibility PPAT In Making Deed of Sale and Purchase of Land Certified Which Does Not Match Making Deed Conditions of PPAT (Studies in PPAT in the District Dharmasraya). The purpose of research is to find out the deed, the causal factors and sanctions inflicted to PPAT on land purchase deed which is not in accordance with the provisions of PPAT deed. Used empirical juridical approach to the specification of descriptive research and data sources used are primary data and secondary data. The data collection is to conduct research in field that can support existing theories, then after the data have been analyzed conclusions drawn by qualitative analysis method. Based on the results of the study found that the responsibility PPAT in deed of sale and purchase of land that is not in accordance with the provisions deed PPAT is: PPAT dishonorably discharged, Deed PPAT degraded the strength of proof becomes deed under the hand and third parties can use this to their interests.